

SUBJEK “YANG-POLITIK”: MENAFSIR SUBJEK POLITIK PADA PASCA-MARXISME ERNESTO LACLAU

Luthfian Haekal

Social Movement Institute

E-mail: luthfianhaekal@gmail.com

ABSTRAK.

Penelitian ini berusaha menguak pengartian subjek politik dalam pasca-Marxisme Ernesto Laclau. Subjek politik di dalam pasca-Marxisme direpresentasikan melalui subjek emansipatif yang akan membawa politik emansipasi. Melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa pengartian subjek politik dalam pasca-Marxisme sangat berbeda dengan Marxisme. Perdebatan-perdebatan ontologis antara Marxisme dan pasca-Marxisme, bahkan di tubuh pasca-Marxisme mengenai “subjek” tersaji di dalam artikel ini. Secara lebih spesifik, pasca-Marxisme Laclau memadukan budaya psikoanalisis Lacan dan pasca-strukturalisme Derrida. Hal tersebut berimplikasi pada pengubahan pengartian atas “subjek”. Tradisi psikoanalisis Lacan digunakan untuk mengartikan kerentanan subjek bahwa ia tidak pernah dalam keadaan penuh. Sementara, tradisi pasca-strukturalisme Derrida digunakan untuk melakukan dekonstruksi atas tradisi-tradisi Marxisme strukturalis. Penggunaan dua tradisi tersebut tidak hanya berpengaruh pada pengartian atas subjek, ia juga berpengaruh terhadap perdebatan metode dalam melakukan emansipasi. Kunci dari pengartian subjek dalam pasca-Marxisme secara luas adalah subjek yang tidak pernah penuh.

Kata kunci: Ernesto Laclau; pasca-marxisme; subjek emansipatif; subjek politik

“THE POLITICAL” SUBJECTS: INTERPRETING POLITICAL SUBJECTS IN POST-MARXISM ERNESTO LACLAU

ABSTRACT.

This research attempts to uncover the meaning of political subjects in post-Marxism Ernesto Laclau. The political subject in post-Marxism is represented through the subject of emancipation which will bring about the politics of emancipation. Through literature study, this research found that the interpretation of political subjects in post-Marxism is very different from Marxism. The ontological debates between Marxism and post-Marxism, even in the post-Marxism body regarding “Subjects” are presented in this article. More specifically, post-Marxism Laclau combines Lacan’s psychoanalytic culture and post-structuralism Derrida. This has implications for changing the meaning of “Subject”. Lacan’s psychoanalytic tradition is used to interpret the subject’s vulnerability that it has never been in a full state. Meanwhile, Derrida’s post-structuralism tradition is used to deconstruct structuralist Marxist traditions. The use of these two traditions not only influences the interpretation of the subject, but also influences the debate over methods of emancipation. The key to understanding the subject in post-Marxism broadly is that it is never fully captured.

Key words: emancipative subject; Ernesto Laclau; political subject; post-marxism

PENDAHULUAN

Artikel ini mengulas tentang bagaimana “Subjek Politik” diartikan dalam pasca-marxisme Ernesto Laclau. Perubahan pengartian tentang subjek ini berawal dari kondisi objektif yang saat ini terjadi. Perkembangan kapitalisme hari ini telah mengaburkan siapa lawan dan siapa kawan. Dalam tradisi Marxisme struktural, batas subjek telah dengan jelas dipisahkan melalui kondisi materiil Subjek –artinya penguasaan alat produksi menjadi basis antagonisme dalam tradisi marxisme. Dengan demikian, subjek didefinisikan secara deterministik melalui posisi

ia menindas atau ditindas oleh subjek lain.

Imbasnya, pengartian subjek politik dalam marxisme secara “tetap dan penuh” didasarkan pada ketertindasan ekonomi. Subjek yang tertindas secara “tetap” ditentukan melalui posisi antagonistik yang “jelas dan tidak berubah” dari rezim opresif atau subjek penindas. Misalnya, buruh akan selalu memiliki posisi antagonistik dengan pemilik pabrik. Serta, relasi keduanya menjadi *zero sum game* dengan dipisahkan dalam relasi produksi kapitalisme.

Marxisme membagi subjek berdasarkan posisi ketertindasan dan basis materiil yang ada di dalam dirinya. Dua kelas yang secara tetap,

objektif, dan menyejarah adalah proletar dan borjuis. Proletar bagi mereka yang ditindas, tidak memiliki akses terhadap sumber daya, dihisap tenaganya, dan lainnya. Sementara, borjuis adalah mereka yang memonopoli sumber daya dan menghisap tenaga kerja. Keduanya berada dalam posisi antagonisme yang saling bertarung. Jika tidak ada pertarungan kelas, maka terdapat hegemoni yang berjalan.

Posisi yang demikian itu mengakibatkan antagonisme antar subjek. Akibatnya, relasi *zero sum game* terjadi di antara subjek. Relasi-relasi *zero sum game* inilah yang diamini para pemegang ideologi. Maksudnya, relasi itu bersifat meniadakan subjek lain yang berbeda dengannya. Misalnya, dalam konteks Indonesia, relasi *zero sum game* ini hampir terjadi di pilpres 2019. Julukan-julukan “Cebong”, “Kampret”, “Cebi IQ Sekolam”, “Sahabat Gurun”, dan lainnya menjadi awal pemantik untuk meniadakan identitas lain. Misalnya, “Cebong” akan meniadakan relasi dengan “Kampret”, karena kampret dianggap sebagai orang yang mengidamkan “Khilafah Islamiyah”. Sementara, “Kampret” meniadakan relasi dengan “Cebong” karena dianggap sebagai orang yang sekular.

Formasi subjek tersebut tidak semena-mena karena posisi antagonistik antara proletar dan borjuis yang dipisahkan melalui ekonomi. Pembilahan identitas tersebut terjadi karena perbedaan dukungan yang sangat cair. Singkatnya, posisi antagonistik tersebut antar pendukung yang merepresentasikan keduanya berasal dari populisme kanan. Pendukung Prabowo dicitrakan sebagai populisme kanan dengan politik identitas berbasis agama. Sementara, pendukung Jokowi dicitrakan sebagai populisme kanan dengan politik identitas berbasis “nasionalisme”. Pada titik yang paling tinggi, kedua populisme kanan itu mencoba untuk meniadakan identitas lain.

Posisi yang saling meniadakan itu ada, karena terdapat idealisasi terhadap tatanan dunia yang sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ideologi menjadi idealitas masing-masing subjek untuk menciptakan kehidupan ideal mereka (Laclau, 2006). Oleh karenanya, ideologi niscaya menciptakan antagonisme peniadaan pihak lain yang berlainan dengannya. Konstruksi identitas “kami yang tertindas” dan “mereka yang menindas” seakan-akan menjadi garis batas yang jelas –melalui kondisi objektif (basis).

Formasi subjek “Cebong” dan “Kampret” itu telah dibuyarkan karena rantai ekuivalensi subjek –meminjam istilah Laclau– kedua kubu telah “diakomodasi” oleh partikularitas subjek lain. Bersatunya Prabowo ke kubu Jokowi menjadi momen untuk membentuk rantai ekuivalensi Subjek yang baru. Setelah “Cebong” dan “Kampret”, muncullah rantai ekuivalensi baru yang terbentuk karena bersatunya elite politik itu. Sebutan “Cebong Bersayap” atau “Cepret (Cebong Kampret)” menjadi konstruksi identitas subjek karena rekonstruksi rantai ekuivalensi itu. Hal ini lah yang menjadi basis materiil mengapa artikel ini ditulis. Artikel ini ingin untuk menggambarkan transformasi subjek yang cair itu.

Sementara secara teoritis, penelitian mengenai transformasi subjek politik *a la* Laclau ini bukanlah hal yang baru, utamanya dalam rentang waktu lima tahun ke belakang. Tulisan ini berangkat dari artikel yang ditulis oleh Salter (2016) berjudul *Populism as a fantasmatic rupture in the post-political order: integrating Laclau with Glynos and Stavrakakis* dan McKean (2016) berjudul *Towards an Inclusive Populism? On the Role of Race and Difference in Laclau's Politics*. Penulis berusaha mengisi beberapa kekosongan yang ditinggalkan oleh kedua riset tersebut. Salter (2016) dalam artikel jurnalnya mengelaborasi trajektori politik populisme *a la* Laclau dengan trajektori politik Glynos dan Stavrakakis. Ketiganya memiliki benang merah dengan menggunakan psikoanalisis Lacan melalui *fantasy*, *enjoyment*, dan *jouissance*. Glynos dan Stavrakakis menafsirkan psikoanalisis yang dipakai oleh Laclau. Namun, bukan berarti menjadi hal yang identik antara Laclau, Glynos, dan Stavrakakis. Keseolahan identik itu membuat Salter (2016) menyatukan partikularitas yang dihubungkan oleh psikoanalisis Lacan menjadi basis utama trajektori politik ketiganya. Artikel dari Salter malah membuyarkan partikularitas yang ada di Laclau dengan membentuk universalitas dari Laclau, Glynos, dan Stavrakakis.

Sementara, dalam artikel jurnal yang ditulis oleh McKean (2016) memikirkan ulang trajektori politik populisme *a la* Laclau. Baginya, Laclau tidak memberikan ontologi politik yang jelas terhadap batasan-batasan eksklusi identitas subjek. Trajektori politik transformasi subjek itu karenanya harus dibaca sebagai hal yang

problematis, bukan sebagai alat jika harus dibaca secara inklusif (McKean, 2016).

Kekosongan yang ditinggalkan kedua artikel tersebut, utamanya adalah dimensi fantasmatis. Oleh karenanya, pada artikel ini akan menitikkan transformasi subjek *a la* Laclau dengan “membangkitkan kembali” unsur fantasmatis itu. Dimensi fantasmatis menjadi titik utama ketika memikirkan mengenai subjek *a la* Laclau. Utamanya menjadi pembeda antara subjek *a la* marxisme dan subjek *a la* post-marxisme.

Dalam artikel ini, kelompok marxis dibagi menjadi empat (Filc & Ram, 2014). *Pertama*, “penolakan total” (marxisme anti-posmoderne). *Kedua*, “penerimaan total” (post-marxisme). *Ketiga*, di antara “penolakan di beberapa bagian” (marxisme pasca-modernis). *Keempat*, “menerima beberapa bagian” (sintesis marxisme pasca-modernisme). Marxisme anti-pascamodern tetap dengan pengartian subjek selayaknya marxisme klasik. Marxisme postmodernis tetap menggunakan analisa kelas marxisme, tetapi mengkonseptualisasi “perjuangan baru” dan “subjektivitas politik”. Sintesis marxisme pasca-modernisme melihat subjektivitas politik sebagai kombinasi dari kategori marxisme klasik dan identitas kultural. Sementara, pasca-marxisme melakukan dekonstruksi terhadap konsep kelas marxisme dan merumuskan perjuangan baru.

Marxisme anti-pascamodern sebut saja Ellen Wood, Leo Panitch, Samir Amin, atau Eric Olin Wright (Filc & Ram, 2014). Tokoh-tokoh tersebut menolak pasca-modernisme, karena pemikiran tersebut dinilai telah menggantikan perspektif idealis untuk fondasi materialisme marxisme. Sementara, marxisme pasca-modernis, “menolak sebagian” dalam artian mereka menolak pasca-modernisme sebagai epistemology, namun menerima beberapa bagian seperti budaya dan kesadaran atas kapitalisme kontemporer. Tokoh seperti David Harvey oleh Filc dan Ram (2014) masuk pada kategori ini dengan menyesuaikan dengan kondisi kapitalisme kontemporer hari ini.

Lebih lanjut, sintesis marxisme pasca-modernisme, misalnya seperti Nancy Fraser. Ia menggunakan “Dual Perspektif” secara bersamaan. Sementara, pasca-marxisme berkebalikan dengan marxisme anti-pascamodern. Mereka benar-benar menerima pemikiran pasca-modernisme, misalnya Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, dan Baudrillard.

Di dalam marxisme, kelas pekerja merupakan kelas sosial-politik yang secara objektif mewakili kepentingan kelas tertindas dan secara subjektif mendapatkan kesadaran untuk melakukan politik emansipasi –atau dalam istilah aktivis kiri disebut sebagai aksi revolusioner (Filc & Ram, 2014). Dalam era yang diklaim sebagai pasca-modernisme, terdapat pembuyaran pengartian subjek emansipatif. Ia mengklaim adanya kematian subjek, kematian sejarah emansipasi, dan lainnya. Banyak intelektual marxis yang menolak pasca-modernisme dalam mengartikan subjek dan kaitannya dengan politik emansipatoris.

Posisi yang demikian itu ditolak oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Subjek tidak didefinisikan selayaknya kaum marxis yang menganggap subjek bisa didefinisikan melalui basis materiilnya. Karenanya, Laclau dan Mouffe disebut sebagai pasca-marxisme sebagai sebuah tradisi yang telah meninggalkan analisis kelas dan memadukan dengan tradisi analisa diskursus, pasca-modernisme, maupun psikoanalisis. Ellen Meiksins Wood (1998) dalam bukunya *The Retreat from Class: A New ‘True’ Socialism* menyebut pasca-marxisme sebagai “*A New True Socialism*” (NTS).

Baginya, NTS membanggakan diri pada penolakan terhadap “determinisme ekonomi” dan “mereduksi kelas”, serta perjuangan kelas telah dikeluarkan dari proyek sosialis (Wood, 1998). NTS mencakup berbagai sikap politik dan memiliki ekspresi dalam berbagai genre intelektual. Eksponennya termasuk di antara sejumlah ahli teori politik dan ekonomi, para analis ideologi dan budaya, dan sejarawan. Misalnya, Ernesto Laclau, Barry Hindess, Paul Hirst, dan Gareth Stedman Jones (Wood, 1998).

Gelombang pasca-marxisme ini telah ada sebelum 1988 ketika jurnal *Marxism Today* menuliskan “*New Times*” yang didefinisikan sebagai “perubahan kualitatif” dalam kehidupan sosial dan kultural (Filc & Ram, 2014). Hal tersebut merujuk pada “pasca-Fordisme” sebagai akar dari penyebab “*New Times*”. Editorial jurnal tersebut memperingati kelompok marxisme klasik bahwa mereka menyebarkan “pasukan kuda untuk menghadapi pasukan tank” (Hall & Jacques, 1989). Pasca-modernisme, atau spesifik pasca-strukturalisme adalah komponen vital dari “*New Times*”.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pasca-modernisme telah membawa beberapa

penganut marxisme untuk menelaah ulang apa yang disebut sebagai subjek. Mereka yang benar-benar melepaskan tradisi marxisme, mengolok-olok pengartian subjek yang diartikan berdasarkan basis. Sementara, mereka yang tetap mempertahankan tradisi marxisme mengolok-olok pasca-marxisme sebagai liberal.

Laclau (2005) dalam bukunya *On Populist Reason* mengeksplorasi konseptualisasi tentang subjek yang menyatakan bahwa “*the people*” menjadi subjek kontemporer yang relevan atau inti dari perjuangan politik yang saat ini ada. Ide “*the people*” otomatis menjadi alternatif untuk konsep kelas sosial sebagai jalan menaruh pembentukan kelas sosial. Pada tataran selanjutnya, “*the people*” menjadi subjek “yang-politis” memperjuangkan perjuangan emansipatif. Ia juga disebut sebagai subjek emansipatif.

Karenanya, artikel ini seperti yang telah dijelaskan pada awal paragraf berusaha untuk menafsir subjek politik di dalam pasca-marxisme Ernesto Laclau. Memikirkan subjek politik menjadi penting untuk dilihat karena berkelindan dengan politik emansipatif yang akan dibentuk oleh gerakan. Melakukan fiksasi atas subjek politik, berarti melakukan fiksasi atas politik emansipatoris yang akan dipikirkan dan diartikulasikan.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi literatur sebagai titik utama. Creswell (2007) dalam *Qualitative Inquiry and Research Design* menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok yang dianggap sebagai fenomena sosial. Hal yang dianggap sebagai fenomena sosial adalah pemaknaan subjek *a la* Laclau untuk membentuk gerakan emansipatoris. Penelitian ini berdasar studi literatur integratif. Maksudnya, memberikan ikhtisar atau *overview* untuk meninjau atau berpotensi untuk memikirkan ulang mengenai suatu pemikiran (Snyder, 2019). Tujuannya adalah mempertemukan berbagai mazhab pemikiran mengenai suatu hal, dalam hal ini pengartian subjek *a la* Laclau.

Sementara, data dikumpulkan melalui data-data sekunder melalui buku-buku dan artikel jurnal terkait. Lebih khusus, pada penelitian ini

menitikberatkan pada karya-karya yang telah ditulis oleh Ernesto Laclau untuk mengartikan Subjek. Serta karya sekunder dari penulis lain untuk menafsirkan pemikiran Laclau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ide Tentang “Subjek”

Pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, pengartian subjek dalam pasca-marxisme. *Kedua*, ide subjek dalam pasca-marxisme Laclau. Subjek menjadi penting untuk dibicarakan, karena tanpanya tidak ada pembicaraan mengenai perjuangan. Subjek tidak hanya menentukan perjuangan yang akan dilakukan, ia juga menentukan cara untuk melakukan perjuangan. Hal tersebut termasuk relasi dengan yang dianggap beroposisi. Subjek dalam marxisme klasik memiliki ciri *zero sum game*. Sementara, dalam perjuangan politik emansipatif Laclau-Mouffe bersifat agonistik. Artinya, pengubahan relasi dengan yang beroposisi dari bersifat musuh, menjadi saingan (*adversary*). Hal tersebut dijelaskan dalam karya Laclau-Mouffe (2001) berjudul *Hegemony and Socialist Strategy*.

Dalam marxisme klasik, proletariat sebagai subjek yang akan memimpin revolusi. Meski, dalam analisisnya memerlukan beberapa konsep tambahan yang memediasi “kelas” –sebagai lokus proses produksi- dan gerakan empiris – yang ditafsirkan oleh Lenin melalui partai politik. Subjek itu dipandang sebagai sesuatu yang “*a priori*” yang diasumsikan begitu saja ada secara niscaya. Dalam kondisi marxisme, menjadi ada begitu saja ini berdasarkan basis, seperti yang telah dijelaskan di atas, yang mana merupakan kondisi objektif subjek yang didasarkan pada ekonomi.

Agak sulit membayangkan pengartian subjek pasca-marxisme Laclau tanpa menyertakan Mouffe dan apa yang membedakannya dengan subjek di dalam marxisme. Meski begitu, Laclau dalam karya-karya setelahnya lebih intens dalam perdebatan mengenai subjek. Dalam *On The Political*, Mouffe (2005) menggarisbawahi relasi subjek yang harus ditentang sembari memikirkan trajektori politik emansipatif. Relasi tersebut ialah relasi subjek yang memberikan pembeda antara kawan dan lawan –yang mana relasi tersebut menjadi titik tumpu marxisme dan ideologi lainnya. Meski memang titik utama *On The*

Political adalah mengkritik Carl Schmitt pada saat ia mengartikan subjek yang terlalu antagonis.

Her critical engagements with Marxism in the late 1970s and early 1980s, for example, reflected wider discussions about how to reconcile movements such as feminism and ecologism with prevailing assumptions about the explanatory and political primacy of social classes. Her first book, the edited collection Gramsci and Marxist Theory (Mouffe 1979), gathered contributions to prevailing theoretical debates on the European continent concerning the meaning and application of the work of the Italian Marxist, Antonio Gramsci (1891–1937), whose elaboration of the concept of hegemony remains of seminal importance in Mouffe’s political theory (Martin, 2013: 2).

Dalam salah satu bagian tulisan di buku *Chantal Mouffe: Hegemony, radical democracy, and the political*, Martin (2013) mengerangai perdebatan Mouffe terutama marxisme kontinental dan feminisme. Keduanya memfokuskan pada perjuangan gerakan sosial melawan kekuatan kelompok yang dominan dan pada akhirnya relasi yang ditempatkan adalah relasi antagonistik. Hal ini menundukkan perbedaan konflik di dalam marxisme.

Conflict, then, is not simply a condition of democratic politics for her; it is an integral dimension of her understanding of society and a characteristic of her own style as a critic. Unashamedly theoretical, her writings nevertheless refuse extended abstraction or system building. Instead, they regularly take issue with prevalent intellectual currents, focusing theoretical labour on exposing the unexamined assumptions and prejudices of the mainstream in order, ultimately, to stimulate a radically different politics (Martin, 2013: 1).

Hal tersebut -yang telah disampaikan Mouffe- termateriikan ketika Laclau mengartikan hegemoni. Hegemoni yang dimaksud Laclau-Mouffe adalah nalar berlangsungnya sebuah wacana, bukan nalar subordinasi kelas sebagaimana dipahami oleh Gramsci (Ardianto, 2016). Pada hegemoni yang dibangun oleh Gramsci, ia mengartikan penguasaan kelas dengan menundukkan kekuatan-kekuatan oposisi dan

kemudian berhasil menciptakan konsensus atas kelas yang dikuasai (Ardianto, 2016). Dengan analisa marxisme, Gramsci menempatkan analisa kelas sebagai titik pijakan analisis. Pasca-marxisme Laclau-Mouffe benar-benar telah mencerabut tradisi marxisme dalam memahami hegemoni (Geras, 1988).

Dengan kata lain, Gramsci menempatkan essensialisme yang termanifestasikan dalam determinisme ekonomi.¹

Gramsci’s insistence on the primacy of political and ideological relations over economic structures was uniquely combined with analyses of the relational and unstable character of all social identities. The conclusions the authors drew fundamentally challenged the defining precepts of Marxist thinking: namely, the economic logic that configured society as a coherent object with a stable essence; the displacement of politics to a contingent status supplemental to an underlying necessity; and the primacy granted in socialist political discourse to the interests of the working class in the formation of alliances, democratic or otherwise (Martin, 2013: 3).

Patahan dari tradisi marxisme yang dikembangkan Mouffe tergambar melalui anti-essensialisme, *discourse*, artikulasi, dan rantai ekuivalensi. Marxisme mempertahankan fokus pada hubungan kekuasaan dan dominasi sebagai penggerak arus politik radikal. Tetapi hegemoni Mouffe menunjuk kumpulan semua identitas sosial yang sedang berlangsung tanpa keistimewaan, dan tidak lagi hanya mengindikasikan keterkaitan kelas ekonomi (Martin, 2013).

Selain determinisme ekonomi, hal yang paling mendasar berikutnya mengenai reduksi kelas. “Kelas” dalam pandangan marxisme seperti yang telah ditafsirkan oleh Martin (2013) hanya berdasarkan pada posisi subjek yang dipisahkan melalui produksi ekonomi kapitalistik. Sementara, Laclau-Mouffe menolak pandangan kelas yang hanya direduksi melalui basis ekonomi.

Mouffe and Laclau both pluralised antagonism and refused the utopia of a fully-

¹ Dua bagian awal dalam buku “*Chantal Mouffe: Hegemony, Radical Democracy, and the Political*” yang diedit oleh James Martin (2013) menjelaskan lebih lanjut “intervensi” Gramsci dalam post-marxisme Laclau-Mouffe

reconciled society. In dispensing with the primacy of class, antagonisms were never reducible to one (economic) difference alone. As the decline of social democracy demonstrated, conflicts over race, ethnicity, gender or class could coexist and mutually distort each other in public discourse. Hegemonic politics, in their view, therefore entailed the ongoing management and displacement of numerous antagonisms, but never their final resolution (Martin, 2013: 4).

Dengan kata lain, hegemoni bagi Gramsci adalah pengorganisasian persetujuan – proses yang dilakukan melalui bentuk-bentuk kesadaran yang ter subordinasi dikonstruksi tanpa harus melalui jalan kekerasan atau koersi (Hutagalung, 2008). Selain itu, hegemoni juga merupakan bentuk masyarakat sipil yang membangun kekuatan politiknya dalam menghadapi rezim yang menindas dan represif (Hutagalung, 2004). Dalam hegemoni Gramsci, kelas-kelas buruh mengambil bagian untuk membangun perlawanan antagonistik ke kelas-kelas penguasa modal.

Subjek dalam Pasca-Marxisme

Poin yang paling relevan untuk subjek adalah kepenuhan itu (*fullness*) —dalam istilah Freudian— tidak bisa diraih; Subjek hanyalah ilusi retrospektif yang diganti melalui perwujudan objek parsial dengan kemustahilan totalitas (Laclau, 2006: 651).

Pengertian subjek dalam pasca-marxisme menjadi penting, karena ia menundukkan artian “*the people*” dan spesifiknya “*The Emancipatory Subject*” sebagai proyek utama pasca-marxisme. Namun, pengertian tentang subjek emansipatif dalam pasca-marxisme bukanlah sesuatu yang tunggal. Ia masih dalam kerangka perdebatan antar penganut pasca-marxisme.

Laclau (2006) dalam artikelnya *Why Constructing a People Is the Main Task of Radical Politics* mengerangkai artian subjek yang selama ini menjadi perdebatan. Tulisan tersebut merupakan tulisan balasannya kepada Slavoj Zizek (2006) yang menurutnya terdapat sesat pikir dalam memahami bukunya *On Populist Reason* dan ide mengenai “Subjek” itu sendiri. Meski, keduanya berangkat melalui tradisi yang sama, yaitu tradisi Lacanian.

Sebelum masuk pada perdebatan antara

Laclau dan Zizek, Yannis Stavrakakis (2007: 67) dalam *The Lacanian Left* menjembatani bagaimana konsep Laclau mengenai “posisi subjek” bergerak menuju “*Subject of lack*”:

As he clearly points out in a 1993 interview, although ‘Lacanian theory played an important role in my theoretical trajectory at least from the beginning of the eighties. this influence has increased during these last years’ (Laclau 1993: 58). This has led him to a very important redefinition of some of the categories of his theory of hegemony: one can think of the shift from a conception of subjectivity in terms of ‘subject positions’ to acknowledging the importance of understanding subjectivity in terms of the subject as lack, a redefinition put forward in New Reflections.

Poin kebergerakan itu nampak pada konsep dislokasi Laclau. Dislokasi dalam pandangan Laclau sebagai “*constitutes the ultimate ontological horizon of human construction and discourse*” (Laclau, 1990). Kemudian bergerak seperti yang dituliskan oleh Stavrakakis (2007: 69):

But the lack produced by dislocations is not purely negative; it is also productive: ‘one needs to identify with something because there is an originary . . . lack of identity’ (Laclau 1994: 3). This acceptance of a (productive) negative ontology is what brings Laclau so close to the Lacanian problematic in one of its essential and most revealing aspects. For in Lacanian theory, Laclau’s ‘discourse’ – roughly equivalent to Lacan’s symbolic, the order of the signifier – is similarly revealed as lacking: it attempts the impossible, that is to say, the representation of something ultimately unrepresentable. Both at the subjective and at the objective level there is always a real which escapes our attempts to master it, to represent it, to symbolise it. It is the impossibility of mastering this real, which splits subjective and objective reality, that creates and sustains desire.

Selanjutnya, psikoanalisis Lacan digunakan Zizek untuk memanipulasi, merekonstruksi dan mengembangkan pengertian subjek. Zizek meyakini bahwa subjek itu ada, walau selalu terbelah, dan karenanya ia secara terus menerus

bergerak memenuhi dirinya (Akmal, 2018). Berkenaan dengan subjek “yang-kosong”, Zizek menafsir ulang apa yang dikatakan Rene Descartes sebagai *cogito*. Subjek yang dipahami sebagai ego dianggap menjadi subjek ketika mereka mempunyai apa yang disebut sebagai *cogito*, sadar, berpikir. Proses berpikir itulah tidak lain sebagai proses yang merepresentasikan sesuatu dengan substansi yang lain. Sementara bagi Zizek, berpikir sebagai proses subjek mengevaluasi diri dari dunia (Akmal, 2018). Maka, Zizek menempatkan Lacan sebagai referensi utama yang konstan digunakan dalam analisis.

Sementara, psikoanalisis ditempatkan oleh Laclau sebagai salah satu referensi “tambahan” untuk analisis (Stavrakakis, 2007). Hal tersebut pada akhirnya berimbas pada pengartian Laclau atas subjek. Sebelumnya, Laclau mengartikan subjek melalui posisi subjek antara “yang ditindas” dan “yang menindas”. Hal ini hampir sama dengan marxisme relasional dalam memposisikan subjek, hanya saja Laclau keluar dari tradisi determinisme ekonomi yang diamini oleh marxisme ortodoks.

Pada akhirnya, berawal dari psikoanalisis Lacan, subjek dalam pemikiran Zizek² mau pun Laclau dipahami sebagai “*Subject of Lack*”. Subjek dalam pasca-marxisme selalu mengandaikan “subjek yang tidak pernah total”. Subjek hanyalah ilusi restrospektif yang diganti melalui objek parsial dan seolah-olah mencapai ketotalan. Keseolah-olahan yang berada dalam ketotalan itu mengalami proses “fiksasi” secara terus menerus. Fiksasi inilah yang secara parsial “men-total-kan” subjek. Subjek “dikosongkan” sehingga terus mengalami perombakan-perombakan terhadapnya. Akhirnya, konsep seperti “masyarakat” menjadi fantasi atau imajinasi yang dibuat seolah-olah keberadaan secara total itu dapat tercapai. Subjek selalu berada di dalam keadaan dan jalur yang rentan –meminjam istilah dari Lacan.

Lacan membagi menjadi tiga konsep dalam tahap menjadi “manusia” yang ia sebut sebagai “*Oedipus Complex*”. Istilah tersebut merujuk pada tiga tahapan, yaitu fase pra-oedipal (Yang-

Riil), fase cermin (Yang-Imajiner), dan fase oedipal (Yang-Simbolik) (Stavrakakis, 2007). Ketiganya merujuk pada pembentukan subjek dalam tradisi Lacanian yang berada pada register simbolik dan transformasi dari agen menjadi subjek mensyaratkan submisi agen ke dalam tataran simbolik.

Fase pra-oedipal (Yang-Riil) merujuk pada tahap bayi belum mengenali dirinya dan batasan egonya. Diri bayi merasa satu dengan diri ibunya dan dengan diri yang lain tak ada yang membedakan. Bayi dan ibu masih merupakan kesatuan (Manik, 2016). Sementara, pada fase cermin (Yang-Imajiner) proses pembentukan subjek yang didominasi oleh identifikasi dan dualitas, sebelum pengenalan pada bahasa. Pada fase ini, bayi merasa terlepas dengan ibunya dan oleh karenanya, ada kekurangan subjek di dalam bayi yang belum terbahasakan. Sementara, fase oedipal (Yang-Simbolik) merujuk pada kastarsi yang mana anak harus berpisah dengan ibu. Subjek ibu dianggap sebagai hal yang berbeda karena ibu dilihat bukan lagi sebagai kesatuan dari anak. Kastarsi itu juga didorong oleh hadirnya Subjek ayah.

Bagi Lacan, kerentanan subjek merupakan lubang bagi struktur simbolik, ketidakmungkinan ia hadir secara penuh di dalam ranah simbolik. Potongan yang dibuat oleh rantai penandaan adalah satu-satunya potongan yang memverifikasi struktur subjek sebagai diskontinuitas dalam kenyataan (Lacan, 1977). Kerentanan memainkan peran dialektik di dalam dua kondisi kemungkinan dan ketidak-mungkinan. Subjek dengan demikian muncul dari kerentanan struktural dan identifikasi adalah upaya untuk mengisi kerentanan tersebut. Kerentanan mengungkapkan ketidakmungkinan fiksasi makna yang penuh (Muller, 2012). Identitas subjek karena itu ditangguhkan dalam hubungan dialektis kerentanan dan hegemoni.

Relasi berbagai identitas menyebabkan identitas selalu rentan dan berada pada jalur yang memungkinkan ia menjadi berubah-ubah karena medan diskursif yang terus-menerus diisi oleh diskursus yang mengkonstruksinya (Mouffe, 1992). Karena Subjek selalu dalam posisi diskursif, maka ketotalan subjek tidak pernah tercapai. Karenanya, ia membutuhkan momen untuk seolah-olah mencapai ketotalan. Meski, “ke-total-an” tersebut hanyalah parsial. “Universalitas” subjek yang terbentuk merupakan pengerasan dari partikular-partikular dalam

2 Ellen Meiksins Wood misalnya dalam “The Retreat From Class: A New ‘True’ Socialism” (1998) serta Dani Filc dan Uri Ram dalam “Marxism After Postmodernism: Rethinking The Emancipatory Political Subject” (2014) menyebut Zizek sebagai penganut Post-Marxisme. Hal tersebut karena posisi Zizek yang mengadopsi Post-Modernisme dan Psikoanalisis dalam memodifikasi metodologi yang ada di dalam Marxisme.

medan diskursif (Laclau, 2000). Maka, formasi diskursif itu lah yang menentukan pengartian dan “ketotalan” –dipandang sebagai fiksasi jika menggunakan istilah pasca-struktural- dari subjek itu.

Ide tentang fiksasi subjek menjadi hal utama dalam pasca-marxisme. Hal ini karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa subjek selalu dalam posisi yang rentan. Tidak ada kesatuan yang tetap dalam setiap formasi diskursif. Elemen-elemen yang ada pada dirinya berbeda-beda dan tidak menghasilkan koherensi total. Identitas dalam setiap kelompok dalam formasi diskursif bersifat relasional. Subjek tidak memiliki identitas terlepas dari hubungannya dengan yang lain (Suryajaya, 2016). Maka, formasi diskursif subjek tidak memiliki identitas yang tetap karena setiap formasi diskursif itu selalu berelasi secara internal dengan formasi diskursif Subjek lainnya. Relasi ini merelatifkan identitasnya. Dalam setiap artikulasi, dalam setiap hegemonisasi, tidak ada identitas yang bisa dipastikan, semua bersifat relasional.

Oleh karenanya, subjek yang terjahit secara penuh tidak mungkin ada. Subjek tak lain hanyalah efek dari artikulasi hegemonik. Setiap tindakan sosial selalu beroperasi dalam wilayah makna-makna yang dikonstitusikan oleh proses artikulasi hegemonik. Subjek yang secara penuh tidak ada, karena ciri relasional dari artikulasi hegemonik akan membatalkan setiap kepenuhan dari subjek (Suryajaya, 2016). Subjek, karenanya selalu disifatkan oleh tegangan relativitas relasional dari seluruh momen yang ada di dalamnya maupun elemen “eksternal”. Meski demikian, elemen eksternal juga tidak bisa sepenuhnya swa-identik dalam eksternalitasnya, karena ia juga terkonstitusikan oleh relasinya terhadap subjek yang lain. Subjek dengan demikian selalu berada dalam kondisi negosiasi dan konstruksi kolektif tanpa akhir.

Its ‘magic’ filling can operate because the subject is originary lack of being. But if the subject is originary and ineradicable lack, any identification will have to represent, as well, the lack itself. This can only be done by reproducing the external character of that with which the subject identifies itself, that is, its incommensurability vis-a-vis itself (Laclau & Zac, 1994: 15).

Artinya, “kepenuhan” subjek dapat tercapai

melalui hegemoni. Ia didefinisikan sebagai praktik artikulasi yang memfiksasi titik-titik nodal yang secara parsial memperbaiki makna dari “Yang-Sosial” dalam *system of differences* (Torfing, 1999). Sistem diskursif diartikulasikan oleh proyek hegemonik dibatasi oleh *political frontier* tertentu yang dihasilkan dari perluasan *chains of equivalences* (Laclau & Mouffe, 2001) Ia merupakan praktik artikulasi yang membangun *nodal point* yang secara parsial memodifikasi makna dari yang-sosial dalam sebuah sistem yang terorganisasi (Laclau & Mouffe, 2001).

“Kepenuhan” itu bisa dilihat melalui istilah “*jouissance*” yang dikemukakan oleh Lacan. *Jouissance* hadir dari kesenangan yang telah gagal diperoleh dan kesenangan yang sedang dicari. Kerentanan tersebut melalui istilah psikoanalisis Lacan disebut sebagai fantasi. Ia merupakan konstruksi kerentanan subjek melalui penggambaran “penuh” atas subjek. Pada titik inilah, “*jouissance*” dan hegemoni beriringan secara paralel. Seperti “fantasi”, hegemoni tidak pernah mencapai rajutan yang penuh.

“*Jouissance*” itu hanya bisa direpresentasikan dalam bentuk negatif sebagai sesuatu yang hilang ketika memasuki transformasi menjadi subjek. Ketika agen bertransformasi dalam tatanan simbolik mensyaratkan yang diistilahkan oleh Lacan sebagai “*castration*” (kastarsi). Istilah tersebut merujuk pada alienasi atau pemisahan (Seshadri, 2009). Jadi, “*jouissance*” pada akhirnya akan dikastarsi. Selain itu, “*jouissance*” dipahami sebagai “*jouissance*” karena ilusi retrospektif setelah memasuki tatanan simbolik ketika agen bertransformasi menjadi subjek.

Ide tentang subjek itulah yang benar-benar menolak subjek lahir secara “*a priori*” sebagaimana marxisme klasik dalam mendefinisikan subjek. Penolakan itu terdapat dua hal: *Pertama*, mereka menolak klaim bahwa setiap subjek politik adalah keharusan dalam sebuah subjek kelas; *Kedua*, mereka menyangkal ide bahwa ada area sosial (daerah produksi) dimana kelas telah terdefiniskan (*pre-exist*). Seluruh subjek sosial yang ada merupakan luaran dari tindakan politik. Pluralitas subjek dalam “posisi subjek” adalah hasil dari perjuangan hegemoni politis.

Selanjutnya, subjek berada dalam “kekurangan yang bersifat konstitutif” (*constitutive lack*) yang merujuk pada *negativitas internal*

Derrida maupun Lacan. Maksudnya, setiap subjek selalu berinteraksi internal dengan subjek yang lainnya untuk membatasi ketotalan subjek itu sendiri. Artinya, bagi Laclau keberadaan kerentanan selalu berkaitan dengan antagonisme -seseorang atau sesuatu yang mencegah kita menjadi diri kita yang diinginkan dan bertanggung jawab atas kerentanan identitas kita (Laclau, 1990). Misalnya, Subjek A akan ditentukan oleh Subjek non-A. Maka, inti dari Subjek A terdapat Subjek non-A yang memungkinkan untuk mengidentifikasi Subjek A dan sekaligus membatasi kemutlakan identitas Subjek A.

Kekurangan konstitutif itu menyebabkan representasi total menjadi tak mungkin. Setiap Subjek tak pernah swa-identik atau penuh dalam dirinya, maka setiap kolektivitas merupakan suatu objek *das Ding an sich* (benda pada dirinya sendiri) yang tak pernah bisa direpresentasikan secara definitif. Subjek dikatakan sebagai objek yang gagal (Hudson, 2006). Oleh karenanya, Subjek bukanlah sesuatu yang batas-batas atau definisinya bisa dikemukakan secara tetap. Subjek hanya dimungkinkan melalui posisi-posisi Subjek (*Subject Positions*). Ia dikonstruksikan untuk menandai keberadaan subjek dalam semesta diskursif, dan karenanya posisinya relatif terhadap yang-lain. Relasi dianggap mendahului dan menentukan term-term yang berelasi, maka relasi ini seolah tak punya pendasaran apapun kecuali bergantung pada relasinya dengan yang-lain.

Posisi Subjek, seperti yang telah dijelaskan di atas telah berubah menjadi subjek dengan menghadapi “ketidakpastiaannya” sendiri. Subjek telah “dilempar”, “terlempar”, “dipaksa menjadi” suatu subjek oleh “struktur” yang ada pada dirinya dengan mengidentifikasi dengan yang-lain (Laclau, 1990). Subjek selalu dicirikan dengan kegagalan untuk membentuk dirinya sebagai identitas yang secara penuh mandiri (Hudson, 2006). Karena itu, Subjek harus memilih dan memutuskan identitas sosial baru untuk mendukung dirinya sendiri. Oleh karenanya, ide “Subjek” dalam pasca-marxisme bersifat politis. Tidak ada “Subjek-Politik” yang sepenuhnya bebas dari tujuan politis.

Seandainya terdapat subjek emansipatif tertentu yang mewakili “ketertindasan” tertentu, maka Subjek tersebut dihadapkan oleh “ketertindasan universal” yang dikonstruksi

secara politis melalui ekuivalensi pluralitas tuntutan (Laclau, 2000). Akibatnya, partikularitas itu juga terbelah: melalui ekuivalensi, mereka tidak hanya tetap sebagai diri mereka sendiri, tetapi juga merupakan area efek universalisasi. Subjek “terkontaminasi” oleh rantai ekuivalensi yang diwakilinya.

Ide “Subjek Emansipatif” Pasca-Marxisme Laclau

Setelah pada paragraf di atas membicarakan subjek secara luas, pada bagian ini fokus untuk mengartikan apa yang dimaksud sebagai subjek emansipatif pasca-marxisme *a la* Laclau-Mouffe. Istilah “Subjek Emansipatif” seperti yang telah dijelaskan di atas, ia menjadi perdebatan bagi Laclau dan Žižek. Meski terdapat perbedaan, keduanya memiliki pandangan yang sama, yaitu Subjek Emansipatif berawal dari pencarian ekuivalensi. Artinya, bukanlah keidentikkan total di antara Subjek-Subjek yang berelasi, melainkan justru pembelahan identitas. Di satu sisi ia tetap mempertahankan maknanya, namun di sisi lain ia berpartisipasi dalam identitas yang lebih luas.

Bagi Laclau, Subjek Emansipatif bisa berasal dari representasi *lumpen proletariat* atau sesuatu yang berada di luar relasi produksi. Posisi tersebut melawan Marx terkait posisi tetap *lumpen proletariat* yang selalu menjadi halangan bagi mereka yang tertindas untuk melakukan revolusi. Bagi Marx, subjek yang menjadi titik kunci adalah mereka yang berasal dari dalam relasi produksi itu sendiri. Kata lainnya, proletariat menjadi titik utama perjuangan. Hal tersebut diamini oleh Žižek, bahwa subjek yang merdeka masih ada dan bisa mengubah struktur dunia.

Selanjutnya, Žižek mengatakan perjuangan kelas menjadi titik utama untuk “Subjek Emansipatif”. Baginya, *the real* –meminjam istilah Lacan- adalah perjuangan kelas, maka proletariat menjadi titik utama. *The real* dalam Lacanian, merujuk pada suatu keadaan yang benar-benar utuh dan sempurna tidak kekurangan apapun, ia suci (Hill, 2002). Karena “suci” itu, *The Real* tidak bisa benar-benar disimbolisasikan. Subjek emansipatoris, bagi Žižek secara *par excellence* adalah proletariat -yaitu, kelompok dalam “bangunan sosial” itu sendiri (Žižek, 2006). Meski demikian, Žižek juga menolak perjuangan kelas dengan relasi

zero sum game. Dalam salah satu tulisannya, Zizek (2000) menuliskan *Class struggle or Postmodernism? Yes, Please!* Idiom “Yes, Please!” merupakan candaan Groucho, adik Marx untuk menjawab pertanyaan “Tea or Coffee?” yang merujuk pada penolakan atas keduanya (Zizek, 2000). Sebagaimana ditulis Zizek (2000: 90), “*Class struggle (the outdated problematic of class antagonism, commodity production, etc.) or ‘postmodernism’ (the new world of dispersed multiple identities, of radical contingency, of an irreducible ludic plurality of struggles).*”

Proletariat “ada” sebagai kelompok yang saling bertentangan, yang masuk dan dikecualikan dari masyarakat. Hal itu termasuk dalam pengertian bahwa untuk mereproduksi diri mereka sendiri dan aturan mereka, “Proletariat dieksklusi” dan ia “tidak dapat menemukan tempat yang tepat untuk masyarakat” (Zizek, 2006). Sebaliknya, *lumpen proletariat* adalah kelompok yang secara sosial dan ekonomi terpinggirkan oleh hubungan produksi kapitalis. *Lumpen Proletariat* adalah elemen mengambang bebas yang dapat digunakan oleh strata atau kelas apa saja (Zizek, 2006).

Oleh karenanya, *Lumpen Proletariat* dapat menjadi salah satu partikularitas subjek dalam subjek emansipatif. Ia bisa menjadi subjek emansipatif, namun pada suatu saat ia bisa menjadi bagian dari subjek yang menindas. Meski demikian, Laclau menunjukkan bahwa terdapat kesesatan berpikir Zizek yang sama dengan Marx. Bahwa, “Subjek harus menempati tempat dalam suatu relasi produksi”. Laclau (2006) menggarisbawahi bahwa, “relasi itu yang tidak dimiliki *Lumpen Proletariat*”.

Lebih lanjut, pengartian Subjek Emansipatif dalam pasca-marxisme Laclau-Mouffe memberikan konteks pada perjuangan emansipatif. Laclau (1996) menuliskan enam “dimensi” perjuangan emansipatif: “*the dichotomic dimension; a holistic dimension; the transparency dimension; ‘the preexistence of what has to be emancipated vis-à-vis the act of emancipation’; a dimension of ground, and; a rationalistic dimension*”. Dimensi dikotomis ini merujuk pada diskontinuitas antara “momen emansipatoris” dan tatanan sosial yang mendahului momen tersebut. Sementara, dimensi holistik terkait dengan apa yang dihasilkan atau mengikuti momen emansipasi. *The transparency*

dimension dapat dilihat sebagai “*the Hegelian absolute*”. Maksudnya, penghapusan semua bentuk penindasan. Hal tersebut terjadi ketika “*absolute coincidence of human essence with itself and there is no room for any relation of either power or representation*” (Laclau, 1996: 1).

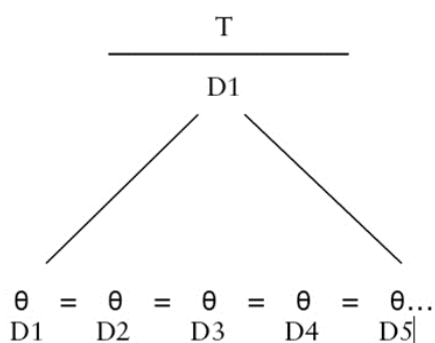
Dimensi selanjutnya, “*the preexistence of what has to be emancipated vis-à-vis the act of emancipation*”. Seperti argumennya, “tidak ada emansipasi tanpa penindasan, dan tidak ada penindasan tanpa kehadiran sesuatu yang terhambat secara oleh kekuatan yang menindas” (Laclau, 1996). Sementara, “*a dimension of ground*” merujuk pada gejala kondisi penindasan saat ini. Karenanya, hal ini juga berkaitan dengan dua dimensi, dikotomik dan holistik. Dimensi ini mewakili tingkat sosial di mana momen emansipatoris, “menuntut” atau “bertindak”, terjadi. Terakhir, “*a rationalistic dimension*” merujuk pada konsep “*The Real*” psikoanalisis Lacan. Bagi Laclau (1996: 2), “*full emancipation is simply the moment in which the real ceases to be an opaque positivity confronting us, and in which the latter’s distance from the rational is finally cancelled*”.

Keenam dimensi tersebut memberi pengartian pada Subjek Emansipatif. Namun, keenam dimensi tersebut bukanlah satu kesatuan yang utuh untuk mengartikan Subjek Emansipatif. Maka, untuk mengartikannya, dapat hanya beberapa saja yang ada di dalam dimensi tersebut (Laclau, 1996). Dalam artikel ini, Subjek Emansipatif dikonstruksikan melalui “tidak ada emansipasi tanpa penindasan”. Subjek Emansipatif didefinisikan sebagai Subjek – atau subjek-subjek- yang akan mengorganisir perlawanan kepada rezim opresif (Flisfeder, 2016).

Laclau melihat “tuntutan sosial” sebagai awal dari proses subjek politik terbentuk. “Tuntutan sosial” diklaim selalu muncul dalam setiap masyarakat sebagai hasil dari interaksi sosial. Ketika “tuntutan sosial” tidak puas, rantai ekuivalensi akan terbangun diantara mereka seperti batas internal antar komunitas politik, batas yang memisahkan “*The People*” dari kekuasaan (Filc & Ram, 2014). Namun, tetap harus dipahami bahwa tuntutan-tuntutan yang terkoneksi melalui rantai ekuivalensi tersebut tidaklah objektif. Mereka terkoneksi hanya melalui oposisinya terhadap kekuasaan dan ketidakpuasan.

Individual frustrations move from antagonism to regime change when distinct demands interact and identify with one another through their mutual identification with a third, unifying signifier. In choosing to identify with this mediating 'empty signifier' – the populist leader, or the notion of the nation or people, or often, both – discrete political entities form larger publics. Laclau describes this process as the transition from democratic demands' to 'the people.' It is also, finally, the sine qua non of all politics, and especially what the left must consider if it is to reignite hopes for future success (Kingsbury, 2016: 497).

Lebih mudahnya memahami Laclau (2005), perlu menggambarkan diagram seperti yang ia tulis di *On Populist Reason*:



Sumber: Diambil dari Laclau dalam *On Populist Reason* (2005).

Gambar 1. Batas Politik

Dalam diagram tersebut, Laclau (2005) menjelaskan bahwa kaum Tsar sebagai rezim opresif dipisahkan oleh batas politik dari berbagai tuntutan dari masyarakat (D1, D2, D3, D4, D5, dan lainnya). Setiap tuntutan dalam partikularitasnya berbeda antara satu dan lainnya. Namun, berbagai tuntutan tersebut sama antara satu sama lainnya karena posisi oposisi terhadap rezim opresif. Ini yang kemudian memungkinkan satu dari semua tuntutan akan memimpin dan mengambil tempat menjadi sebuah penanda –dan penanda tersebut akhirnya mengisi penanda kosong (Laclau, 2005). Akhirnya, dalam gambar tersebut D1 mewakili ekuivalen lainnya. Akan tetapi, apa yang terjadi ketika rezim opresif berusaha dan berhasil memenuhi tuntutan dari D1? D1 kemudian memungkinkan untuk menjalin koalisi dengan rezim opresif. Karena garis batas yang memisahkan antara rezim opresif dan tuntutan sangatlah tidak

stabil. Alhasil, wacana-wacana tersebut kembali berkontestasi dan mencari wakil dari wacana yang akan mewakilinya menggantikan D1.

Dalam diagram di atas, batas politik adalah batas mengidentifikasi siapa lawan dan siapa kawan. Posisi oposisi yang sama dengan rezim opresif disebut sebagai *chains of equivalence*. Dalam hal ini, *chains of equivalence* bertugas untuk mengidentifikasi “common enemy” dan karenanya terdapat simplifikasi dua kubu yang saling bertentangan (Harrison, 2014). Sementara, logika perbedaan adalah pembuyaran rantai kesamaan dan mengembalikannya pada masing-masing partikularitas untuk kemudian membentuk rantai kesamaan yang baru (Hutagalung, 2008).

Dalam istilah Laclau dan Mouffe, antagonisme memainkan peran penting. Menurutnya, antagonisme merupakan *a failure difference* semenjak adanya keterbatasan-keterbatasan dalam obyektivitas sosial (Laclau & Mouffe, 2001). Antagonisme disini, sebagai pembentuk identitas dan hegemoni, karena penciptaan suatu antagonisme sosial meliputi penciptaan musuh yang akan menjadi sesuatu yang penting bagi terbentuknya batas politik yang dikotomik. Antagonisme sosial membuat setiap makna sosial berkontestasi, dan tidak ada yang tetap, yang kemudian memunculkan *political frontier*. Setiap aktor akan memahami identitas mereka melalui hubungan antagonisme, karena antagonisme mengidentifikasi musuh mereka. Misal sebagai contoh, pada perlawanan terhadap kaum Tsar (Laclau, 2005).

Artinya dalam pembayangan Laclau, kelompok-kelompok berada di dalam partikularitas masing-masing yang berbeda. Partikularitas yang berbeda tersebut disebutnya sebagai *logic of differences*. Selanjutnya, ia membayangkan dari berbagai partikularitas tersebut, kelompok-kelompok dapat membentuk sebuah kesamaan yang berakhir pada “homogenisasi” wacana. Kelompok-kelompok dalam pembayangan Laclau, meski mereka berada dalam partikularitas masing-masing, mereka semua berada dalam posisi yang sama.

Pandangan Laclau tentang “partikularitas yang disamakan” sangat berbeda dengan Hardt dan Negri. Jika Laclau mengatakan bahwa partikularitas harus “disatukan”, maka Negri dan Hardt mengatakan bahwa keberagaman kekuatan antagonistik tidak harus disatukan dalam satu

kerangka kekuatan hegemoni (Hardt & Negri, 2004). Selain itu, konteks Laclau “percaya” dengan “populisme Kiri” juga menjadi penyebab terjadinya “kesatuan hegemonik”. Hal tersebut disebabkan adanya penemuan “*equivalence*” dari berbagai sumber ketidakpuasan sosial yang ada dan menyebar melalui bahasa “penindasan” (Hadiz & Robinson, 2017).

Bagi Laclau, pandangan Negri dan Hardt terkait “Multitude” yang sangat spontan dan menyebar itu tidak memiliki artikulasi hegemonik yang jelas (Lipping, 2015). Selain itu, Laclau menitikberatkan dua poin utama mengenai “perjuangan” lewat *multitude a la* Negri dan Hardt. Pandangan itu tidak ada penjelasan koheren mengenai antagonisme sosial dan tidak memiliki kapabilitas untuk mengukur arah perjuangan ke depannya (Claviez, 2019).

Akibatnya, penyatuan itu menyebabkan “universalitas” Subjek dapat tercapai. Namun, kerangka universalitas dalam pengertian pasca-marxisme merupakan partikularitas yang menyeruak memenangkan posisi terdepan. Maksudnya, universalitas merupakan parti-kularitas itu sendiri. Bagi Laclau, seandainya universalitas Subjek perjuangan itu ada, maka ia adalah partikularitas. Tidak ada keadaan universal yang objektif dan murni. Ia hanyalah bagian-bagian dari partikularitas yang ada, yang tidak stabil, dan rentan. Laclau dan Mouffe (2001) menyebutnya sebagai “universalitas hegemonik” untuk menjelaskan watak-watak di atas.

Perlu ditekankan juga, bahwa term “universal” dalam pasca-marxisme Laclau-Mouffe berbeda dengan “universal” dalam Marxisme. *Pertama*, “universal” dalam pasca-marxisme menolak “universal” dalam marxisme sebagai kesatuan kelas yang utuh. Seandainya ada “universal”, ia hanyalah partikularitas yang termediasi –artinya pengerasan dari “Yang-Partikular”- menjadi Subjek Emansipatif. Sementara, “universal” dalam marxisme dicontohkan sebagai homogenisasi kelas pekerja sebagai subjek revolusioner yang tetap.

Universal adalah ‘kekosongan’, namun selalu ‘terisi’ yaitu, dihegemoni oleh beberapa kontingen. Singkatnya, masing-masing Universal adalah medan pertempuran di mana banyak partikular tertentu memperjuangkan hegemoni.... Universal adalah hasil dari perjuangan hegemonik –dalam dirinya sendiri... (Laclau, 2000: 59).

“Yang-Universal” telah menemukan bentuk tubuhnya, tapi bentuk tubuhnya itu adalah partikularitas tertentu itu sendiri. Menjadi “tempat yang kosong”, “universal” telah menjadi lokasi dari semua partikularitas yang mungkin dan “universal” itu menyerap partikular yang ada di dalam dirinya (Laclau, 1996). “Universal” bukanlah rajutan secara penuh berbagai partikular, namun ia adalah dislokasi dari partikular itu sendiri. Universal menunjukkan hanya ada satu artikulasi kekhasan yang mengaktualisasikan bentuk esensial komunitas. “Yang-universal” tidak diisi dari luar, tetapi kepenuhan yang ada di dalam dirinya berasal darinya sendiri dan mengekspresikannya dalam semua aspek organisasi sosial.

Universalitas hanya bisa diperoleh melalui identifikasi sementara dengan tujuan dari sektor sosial tertentu -yang artinya adalah *contingent universality* yang secara konstitutif membutuhkan mediasi politik dan relasi representasi (Laclau, 2000). Proses penamaan dari “universalitas” itu sendiri, karena tidak dibatasi oleh batas konseptual *a priori* adalah proses yang akan menentukan secara retroaktif -bergantung pada artikulasi hegemonik kontingen – apa yang disebut sebagai “universalitas”.

Proses meng-“universal”-kan ini membutuhkan dimensi fantasmatik. Laclau dengan meminjam istilah “*cathexis*” yang merujuk pada Freud menjelaskan bagaimana dimensi fantasmatik diperlukan dalam melakukan fiksasi subjek. Dimensi fantasmatik seperti yang telah paparkan di atas menjadi “alat” untuk melakukan proses identifikasi, bukan melalui posisi subjek, melainkan dari struktur kewacanaan tertentu yang masuk ke dalam diri Subjek. Sementara, “*cathexis*” sendiri dalam pemahaman Laclau (2005: 71) merupakan, “*As such representations cannot have conceptual form, an identity has to depend on additional instances that make it plausible: on radical affective gestures through which the desire of totality is invested into a partial object that starts to represent it.*”

Fungsinya, selain untuk “memandekkan sementara” si Subjek, apa yang dimaksud Laclau dengan “*catachresis*” memainkan peran penting dalam proses tersebut. Istilah tersebut merujuk pada, “*the need to express something that the literal term would simply not transmit*” (Laclau, 2005). Sebagai penciptaan “totalitas”, hanya bisa diciptakan melalui partikularitas yang

menyeruak ke dalam universalitas. Partikularitas itu tidak merujuk pada subjek dan posisi subjek, melainkan pada wacana yang tersebar.

Dengan demikian, konstruksi Subjek dalam pasca-marxisme Laclau-Mouffe tergantung pada relasinya dengan yang lain. Maksudnya, Subjek A akan membatasi diri dengan Subjek B dengan *negativitas internal*. Artinya, apa yang ada di Subjek A ada di Subjek B. Dalam artian, Subjek A bisa menjadi Subjek B, karena relasinya dengan Subjek B. Konteks ini menandakan, apabila ada konstruksi subjek opresif, maka terdapat subjek emansipatif yang berelasi melalui *negativitas internal*. Selain itu, melalui *negativitas internal*, subjek selalu dalam posisi rentan dan berubah-ubah seiring dengan diskursus yang mengisinya.

Konstruksi Subjek Opresif dan Subjek Emansipatif berdasarkan relasinya dengan yang lain. Laku-laku pembatasan atau perlakuan terhadap subjek yang lain menjadi penentu konstruksi identitas Subjek. Subjek Opresif dicirikan melalui laku pembatasan dan laku represif terhadap subjek lainnya. Selain itu, ia juga dikonstruksi melalui “*domain of gain*” yang bermaksud subjek mendapatkan sesuatu dari laku represif itu.

Sementara, Subjek Emansipatif dikonstruksikan melalui Subjek yang dibatasi oleh Subjek opresif melalui laku represif. Konstruksi Subjek Emansipatif berada dalam “*domain of lost*”, artinya ia berada dalam keadaan yang dikurangi “asetnya”. Selain itu, Subjek Emansipatif dalam keadaan mengidentifikasi dengan subjek yang lainnya melalui keadaan yang “ekuivalen”. Posisi-posisi ketertindasan itu membentuk ekuivalensi antar Subjek yang tertindas menjadi “Subjek Emansipatif”.

SIMPULAN

Subjek selalu berada dalam keadaan rentan, karena masyarakat merupakan produk dari kewacanaan itu sendiri. Melalui proses identifikasi, Subjek didefinisikan oleh posisi subjek. Oleh karenanya, Subjek tidak pernah dalam keadaan total. Ia dipenuhi kerentanan. Maka, keber-“ada”-an Subjek secara total tidak akan pernah bisa tercapai. Tidak ada yang benar-benar mencapai ke-“total”-an dalam penolakan atau pun mengamini sesuatu. Elemen-elemen yang pada dirinya berbeda-beda dan tidak menghasilkan koherensi total.

Pada saat Subjek dalam proses identifikasi dalam partikular masing-masing subjek, ia akan mendefinisikan Subjek melalui posisi subjeknya. Oleh karenanya, terjadi oposisi biner, karena ada sesuatu untuk mendiferensiasi sesuatu. Setiap masyarakat, dalam setiap subjek, selalu ada yang-lain daripadanya, yang tak identik dengannya, dan karena itu yang-lain ini merupakan sebuah kekurangan yang ada di dalam subjek, yang tidak bisa sepenuhnya tertutup. Jika ada “Kita”, maka ada “Mereka” atau jika ada kelompok “inklusif”, maka ada kelompok yang hidup di luar diri mereka yang diidentifikasi tidak sama dengan kelompok “inklusif” atau sebut saja “eksklusif”. Kelompok inklusif maupun eksklusif membuat *chains of equivalence* melalui posisi subjek untuk menegaskan keber-“ada”-annya.

Maka, identitas setiap kelompok dalam formasi diskursif bersifat relasional. Yang satu tidak memiliki identitas terlepas dari hubungannya dengan yang lain. Sebuah formasi diskursif tidak memiliki identitas yang tetap karena setiap formasi diskursif selalu berelasi secara internal dengan formasi diskursif yang lain. Relasi ini merelatifkan yang lain. Dalam setiap artikulasi, dalam setiap hegemonisasi, tidak ada identitas yang bisa dipastikan, semuanya bersifat relasional (Suryajaya, 2016).

Alhasil, relasi keber-“ada”-an dalam *chains of equivalence* itu rentan. Mereka akan dikembalikan kepada partikularitas masing-masing seiring dengan identifikasinya dengan subjek lain. Pengembalian kepada partikularitas juga akibat dari usaha-usaha rezim opresif untuk membuyarkan *chains of equivalence* dengan melakukan hegemoni. Hegemonisasi sebagai penyatuan antar kelompok dalam sebuah kerangka acuan bersama yang menjadi benang merah dasar dari kepentingan antar kelompok yang berlainan tersebut (Suryajaya, 2016). Maka, hegemoni bagi Laclau-Mouffe adalah proses pembangunan subjek kolektif yang dirumuskan berdasarkan suatu “kehendak kolektif” yang dikonstruksikan.

Kehendak kolektif yang mengeras disebut sebagai titik nodal. Laclau-Mouffe mengacu pada konsep *points de capiton* dari Lacan, yakni penanda yang difungsikan untuk menetapkan makna dari untaian rantai penanda (Suryajaya, 2016). Artikulasi hegemonik tak lain adalah konstruksi titik fiksasi makna tersebut. Dengan menafikkan ekonomi sebagai basis utama

perjuangan dan menganggap pendasaran pada diskursif, Laclau-Mouffe hendak menyatukan partikularitas “mereka yang tertindas” melawan “mereka yang menindas”. Penafikkan ekonomi sebagai basis utama ini membuat Laclau-Mouffe ditentang oleh berbagai kalangan, termasuk kelompok yang memegang teguh marxisme. Ketika penafikkan basis ekonomi, mungkin saja gerakan akan dibajak oleh elite.

Selain itu, penolakan sebagian premis Laclau mungkin saja karena subjek yang dihadirkan masih dipahami sebagai “Posisi Subjek”. Pada taraf ini, mungkin mengada-ada menyatukan partikularitas LGBT, anti-Islamopobia, atau yang lainnya dalam satu kubu hegemonik. Pengertian subjek yang hanya didasarkan pada “posisi subjek” tidak akan bisa menjelaskan misalnya pada suatu ketika mungkin gerakan politik yang berbeda berada dalam kubu hegemonik yang sama. Pada titik ini Subjek didasarkan melalui posisinya dengan yang lain. Namun, ketika bergeser menjadi “*Subject of Lack*” posisi demikian bisa dijelaskan. Karena, “*jouissance*” akan dikastarsi menjadi “*jouissance*” dan mengisi “kerentanan” Subjek. Pada akhirnya, menjadi subjek akan didasarkan pada transformasi “*jouissance*” itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, R. (2018). *Melawan Takdir: Subjektivitas Pramoeodya Ananta Toer dalam Perspektif Psikoanalisis-Historis Slavoj Zizek*. Yogyakarta: Octopus.
- Ardianto, H. T. (2016). *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan*. Yogyakarta: Penerbit Polgov.
- Claviez, T. (2019). Where are Jacques and Ernesto when You Need Them? Ranciere and Laclau on Populism, experts and contingency. *Philosophy and Social Criticism*, 1132–1143.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage Publication.
- Filc, D., & Ram, U. (2014). Marxism after postmodernism: Rethinking the Emancipatory Political Subject. *Current Sociology*, 62, (3), 295-313.
- Flisfeder, M. (2016). Reading Emancipation Backwards: Laclau, Žižek and the Critique of Ideology in Emancipatory Politics. *International Journal of Zizek Studies*, 2, (1), 1-22.
- Geras, N. (1988). Ex-Marxism without substance. *New Left Review*, 169, 34-62.
- Hadiz, V., & Robinson, R. (2017). Competing Populism in Post-Authoritarian in Indonesia. *International Political Science Review*, 38, (4), 488-502.
- Hall, S., & Jacques, M. (1989). *New Times: The Changing Face of Politics in the 1990s*. London: Verso.
- Hardt, M., & Negri, A. (2004). *Multitude: War and Democracy in The Age of Empire*. New York: The Penguin Press.
- Harrison, O. (2014). *Revolutionary Subjectivity in Post-Marxist Thought: Laclau, Negri, Badiou*. Burlington: Ashgate Publishing Company.
- Hill, P. (2002). *Lacan Untuk Pemula*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hudson, P. (2006). The Concept of the Subject in Laclau. *Politikon: South African Journal of Political Studies*, 33, (3), 299-312.
- Hutagalung, D. (2004). Hegemoni, Kekuasaan, dan Ideologi. *Diponegoro 74: Jurnal Pemikiran Sosial, Politik, dan Hak Asasi Manusia*, 12.
- Hutagalung, D. (2008). Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural: Membaca Laclau dan Mouffe. In E. Laclau, *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru* (pp. xiii-xlviii). Yogyakarta: ResistBook.
- Kingsbury, D. V. (2016). From Populism To Protagonism (and Back?) in Bolivarian Venezuela: Rethinking Ernesto Laclau's on Populist Reason. *Journal of Latin American Cultural Studies*, 495–514.
- Lacan, J. (1977). *Écrits: A Selection*. London: Tavistock.
- Laclau, E. (1990). *New Reflection on The Revolution of Our Time*. London: Verso.
- Laclau, E. (1996). *Emancipation(s)*. London: Verso.

- Laclau, E. (2000). Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of Political Logics. In J. Butler, E. Laclau, & S. Zizek (Eds.), *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left* (pp. 44-89). New York: Verso.
- Laclau, E. (2000). Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of Political Logics. In *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left* (pp. 44-89). New York: Verso.
- Laclau, E. (2005). *On Populist Reason* (1st ed.). London: Verso.
- Laclau, E. (2006). Ideology and Post-Marxism. *Journal of Political Ideologies*, 11, (2), 103-114.
- Laclau, E. (2006). Why Constructing a People Is the Main Task of Radical Politics. *Critical Inquiry*, 32, (4), 646-680.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2001). *Hegemony and Socialist Strategy*. London: Verso.
- Laclau, E., & Zac, L. (1994). Minding The Gap: The Subject of Politics. In E. Laclau (Ed.), *The Making of Political Identities* (pp. 11-39). New York: Verso.
- Lipping, J. (2015). The hedgehog from the pampas: Ernesto Laclau and The Impossibility of Society. *European Political Science*, 271-276.
- Manik, R. A. (2016). Hasrat Nano Riantirno dalam Cermin Cinta: Kajian Psikoanalisis Lacanian. *Jurnal Poetika*, 74-84.
- Martin, J. (2013). Introduction: Democracy and Conflict in The Work of Chantal Mouffe. In J. Martin, *Chantal Mouffe: Hegemony, Radical Democracy, and The Political* (pp. 1-12). New York: Routledge.
- McKean, B. L. (2016). Toward an Inclusive Populism? On the Role of Race and Difference in Laclau's Politics. *Political Theory*, 1-24.
- Mouffe, C. (1992). Citizenship and Political Identity. *The Identity in Question*, 61, 28-32.
- Muller, M. (2012). Lack and jouissance in hegemonic the discourse identification with the state. *Organization*, 20, 279-298.
- Salter, L. (2016). Populism as a fantasmatic rupture in the postpolitical order: integrating Laclau with Glynos and Stavrakakis. *Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online*, 1-17.
- Seshadri, K. R. (2009). Other/alterity: Lacan and Agamben on ethics, the subject and desubjectification. *Psychoanalysis, Culture & Society*, 65-73.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 333-339.
- Stavrakakis, Y. (2007). *The Lacanian Left*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Suryajaya, M. (2016). *Materialisme Dialektis: Kajian Tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer* (2 ed.). Yogyakarta: Resist Book.
- Torring, J. (1999). *New Theories of Discourse: Laclau, Zizek, and Mouffe* (1 ed.). Massachusetts: Blackwell.
- Wood, E. M. (1998). *The Retreat From Class: A New "True" Socialism*. London: Verso.
- Zizek, S. (2000). Class Struggle or Postmodernism? Yes, Please! In J. Butler, E. Laclau, & S. Zizek (Eds.), *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left* (pp. 90-135). New York: Verso.
- Zizek, S. (2006). Against the Populist Temptation. *Critical Inquiry*, 32(3), 551-574.
- Zizek, S. (2008). *The Sublime Object of Ideology*. London: Verso.